

Upaya Realisasi *One China Policy* melalui ECFA (*Economic Cooperation Framework Agreement*)

M. Syamsul Arif Ramadhan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstract

Despite many historical similarities, China and Taiwan experience a non-harmonious bilateral relationship. The two countries, which still have political differences, are trying to establish a relationship through the economic aspect. Until the establishment of the ECFA (Economic Cooperation Framework Agreement) which integrates China-Taiwan economic relations. However, researchers see that this is not only economical aspect, but also China's effort to realize One China Policy. This study seeks to explore Chinese government efforts to realize One China Policy through ECFA. To convey a proper analysis, this study uses the concept of Commercial Diplomacy. By using a qualitative approach and documentation techniques to collect data, the data were analyzed using Milles and Huberman's data analysis techniques. Researchers found some evidence that; The ECFA leads to the realization of the One China Policy. It is evident from the four categories of efforts by the Chinese Government to realize ECFA, namely in the fields of intelligence, networking and public relations, implementation contract negotiators, and problem solving.

Keywords: *One China Policy, ECFA, China-Taiwan, Commercial Diplomacy*

Pendahuluan

Masyarakat di Tiongkok dan Taiwan memiliki kesamaan kawasan dalam satu rumpun tetapi mereka terpisah secara teritorial dan diplomatis. Penyebabnya adalah dengan adanya perang sipil pada tahun 1945 hingga tahun 1949 yang membuat Taiwan secara politis memisahkan diri dari Tiongkok.¹ Akibatnya, kedua negara memiliki sejarah hubungan bilateral yang sulit sekali berjalan secara harmonis. Kemudian, Tiongkok mengeluarkan kebijakan strategis yakni Kebijakan Satu Tiongkok (*One China Policy*) yang memiliki tujuan menyatukan wilayah-wilayah yang melakukan disintegrasi terhadap

¹ "Taiwan.gov.tw." diakses pada 1 Oktober 2018 pukul 13:03, https://www.taiwan.gov.tw/content_3.php.

kekuasaan Tiongkok. Hanya Republik Rakyat Tiongkok yang dianggap satu-satunya Tiongkok di dunia sehingga menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Sedangkan bagi Taiwan, Kebijakan Satu Tiongkok (*One China Policy*) dianggap terdapat dua negara dalam satu bangsa, berarti Taiwan bukanlah bagian dari wilayah Tiongkok dan secara substansi Taiwan adalah negara merdeka tidak terikat oleh Pemerintahan Tiongkok.²

Taiwan menjadi wilayah yang patut diperhitungkan dalam hal kemajuan ekonomi dan aktivitas perdagangannya di dunia internasional. Taiwan menjadi mitra ekspor impor bagi produk elektronik dan kawasan industri alat berat di wilayah Asia. Taiwan berhasil menunjukkan citra diri sebagai wilayah yang mandiri dalam hal mengatur kebutuhan nasionalnya. Bagi Taiwan, Tiongkok menjadi mitra dagang sekaligus salah satu negara utama tujuan ekspor produk. Produk utama ekspor Taiwan yakni elektronik. Tiongkok menerima 42% produk Taiwan dari seluruh total negara tujuan ekspor Taiwan.³ Tiongkok dan Taiwan membentuk sebuah ketergantungan ekonomi dengan banyak melakukan aktivitas perdagangan dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu tahun 1987 hingga tahun 1997, angka pertukaran barang ekspor dan impor antara Tiongkok dan Taiwan naik dari 2% menjadi 18.36%.⁴ Diwaktu yang sama, keduanya mengalami surplus dalam aktivitas perdagangan mereka. Dengan angka yang cukup besar ini, Taiwan dan Tiongkok membangun sebuah kerangka hubungan dagang yang cukup intensif dan terarah. Hubungan ekonomi ini mengalami kemajuan dari masa ke masa hingga terbentuk sebuah hubungan bernama hubungan lintas selat antara keduanya. Pada tahun 2010, Tiongkok dan Taiwan membentuk sebuah kerangka kerjasama yang mengatur hubungan dagang keduanya yang disebut ECFA (*Economic Cooperation Framework Agreement*). ECFA adalah kerangka kerjasama tertulis pertama yang mengatur hubungan lintas selat antara Tiongkok dan Taiwan, termasuk kesepakatan tentang jenis barang yang diekspor dan impor, penyesuaian tarif, peraturan dalam aktivitas ekspor dan impor, dan lain-lain.⁵

Pada tanggal 29 Juni 2010, kebijakan Tiongkok menyetujui perjanjian kerangka kerjasama ekonomi ECFA dengan Taiwan dijadikan sebagai peristiwa bersejarah bagi kemajuan hubungan lintas selat. Melalui kerangka kerjasama ekonomi ECFA, terjadi awal

² Edward Friedman. "Taiwan's Dilemmas and International Peace." (Abingdon: Oxon Routledge, 2006). diakses pada 1 Oktober 2018 pukul 18:25, <http://trove.nla.gov.au/version/207866921>.

³ "Trading Economics." Taiwan Exports. diakses pada 2 Oktober 2018 pukul 12:15, <http://www.tradingeconomics.com/taiwan/exports>.

⁴ "Directorate General of Customs." Ministry of Finance. Taiwan. diakses pada 2 Oktober 2018 pukul 12:18, <https://cus93.trade.gov.tw/FSCE010F/FSCE010F>.

⁵ Winda Alfansa. "Pengaruh Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) terhadap Isu "One China" antara Cina dan Taiwan." (Skripsi S.Hub.Int, Universitas Gadjah Mada, 2016).

transformasi terciptanya perbaikan hubungan di antara kedua negara. Taiwan dan Tiongkok membawa sejarah baru dalam perseteruan yang telah lama terjadi diantara keduanya yakni melalui peningkatan kerjasama dalam bidang ekonomi.

Pada tahun 1986, Pemerintah Taiwan mulai menunjukkan keterbukaannya terhadap Tiongkok dengan melakukan pengurangan aktivitas pembatasan perdagangan dan investasi ke Tiongkok. Peningkatan volume perdagangan dan investasi antara Taiwan dan Tiongkok berimplikasi pada kemunculan ketergantungan Taiwan terhadap Tiongkok yakni apabila memutuskan hubungan dengan Tiongkok, Taiwan akan mengalami defisit perekonomian yang sangat tinggi dikarenakan ekspor Taiwan dari 9,1% dapat meningkat menjadi 23% setelah menjalin kerjasama ekonomi secara intensif dengan Tiongkok.⁶

Dengan latarbelakang hubungan ekonomi kedua negara, Konsep Diplomasi Komersial digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan hubungan antara Tiongkok dan Taiwan. Pada dasarnya, diplomasi komersial adalah diplomasi yang menggunakan elemen-elemen ekonomi seperti perdagangan, investasi, dan sanksi ekonomi. Isu-isu umum yang dibahas dalam studi kasus diplomasi komersial meliputi strategi mencapai tingkat keberhasilan perdagangan internasional suatu negara, serta peran pihak swasta yang didukung oleh negara untuk melakukan ekspansi perdagangan di negara-negara mitranya. Selanjutnya, diplomasi komersial merupakan alat negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, oleh karena itu negara menjadi aktor utama dalam diplomasi komersial. Namun, negara bukanlah pemain tunggal. Peran non negara seperti, pelaku bisnis individu, hadirnya konsumen atau masyarakat, dan sistem perdagangan internasional juga memiliki peran dalam menentukan keberhasilan diplomasi komersial sebuah negara.⁷ Diplomasi komersial adalah kegiatan yang menciptakan nilai. Dengan nilai, berarti kombinasi utilitas dari manfaat yang disampaikan kepada penerima manfaat dikurangi biaya manfaat itu untuk bisnis dan Pemerintah.⁸ Kemudian, Evan Potter menyebutkan bahwa kegiatan tersebut bisa dilakukan oleh Pemerintah dengan *Intelligence, Networking & Public Relations, Contract Negotiator of implementation, dan Problem Solving*.⁹

⁶ Kuo Yu Hsin. "Towards One Taiwan One China: Discard Outdated One China Policy." International Committee for Human Rights in Taiwan (1996):14-15, diakses pada 3 Oktober 2018 pukul 14:23, doi:1027-39999.

⁷ Michel Kostecki and Oliver Naray. "Commercial Diplomacy and International Business." Discussion Papers in Diplomacy April (2007): 1, https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20070400_cdsp_diplomacy_kostecki_naray.pdf

⁸ Porter M. "Competitive Strategy, Techniques for Analysing Industries and Competitors." (Free Press, 1980). diakses pada 18 Maret 2019, pukul 1:17, [https://www.albany.edu/~gs149266/Porter%20\(1985\)%20-%20chapter%201.pdf](https://www.albany.edu/~gs149266/Porter%20(1985)%20-%20chapter%201.pdf)

⁹ Evan Potter. "Branding Canada: The Renaissance of Canada's Commercial Diplomacy." (International Studies Perspective, 2004). diakses pada 23 Maret 2019, pukul 12:48,

ECFA menurut Tiongkok tidak serta merta sebagai usaha meraih keuntungan dalam perdagangan, namun juga nilai. Seperti penelitian Briansyah Sujarwo yang menemukan fakta bahwa ECFA bisa menjadi simbol perdamaian di daerah selat, sehingga Tiongkok mendapatkan nilai positif di mata kompartiot Taiwan, yaitu Amerika Serikat, agar lebih memuluskan hubungan perdagangan Tiongkok dengan Taiwan.¹⁰ Hubungan ekonomi yang terjalin, bisa berdampak positif pada keberhasilan *One China Policy* karena ketergantungan ekonomi Taiwan terhadap Tiongkok untuk kemudian bisa digunakan sebagai instrumen politik Tiongkok.¹¹

Dengan adanya pemaparan diatas yang menurut peneliti telah memiliki dugaan adanya tujuan dan upaya Pemerintah Tiongkok dalam merealisasikan Kebijakan Satu Tiongkok (*One China Policy*) melalui ECFA. Peneliti belum menemukan pernyataan resmi dari Pemerintah Tiongkok tentang ECFA, sehingga dengan adanya penelitian tersebut, akan diketahui upaya-upaya Pemerintah Tiongkok untuk merealisasikan Kebijakan Satu Tiongkok (*One China Policy*) melalui ECFA (Economic Cooperation Framework Agreement).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk penggalan data tentang upaya Pemerintah Tiongkok merealisasikan *One China Policy* melalui ECFA. Dalam penelitian, Pemerintah Tiongkok menjadi unit analisis dengan level analisa pada tingkat negara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui dokumentasi. Dokumentasi adalah pengambilan data yang diproses melalui dokumen-dokumen. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau arsip. Data yang diperoleh berupa tulisan, rekaman seperti buku-buku pedoman, jurnal, surat kabar, website, laporan resmi, catatan harian, dan sumber lainnya.¹² Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan dengan cara melalui studi pustaka dengan melihat data-data yang relevan dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20120504_cling_research_artikel_discussio npaperindiplomacy_123_ruel_and_zuidema.pdf

¹⁰ Briansyah Sujarwo. "Kepentingan Politik Luar Negeri China di Wilayah Taiwan Melalui Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) tahun 2010." (Skripsi S.Hub.Int, Universitas Brawijaya, 2013).

¹¹ Ayu Rahmadhani. "Analisis Ketergantungan Ekonomi Taiwan – Cina terhadap Prospek Reunifikasi dalam *One China Policy*." (Skripsi S.Hub.Int, Universitas Airlangga, 2014).

¹² Arikunto S. "Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal." Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman, yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.¹³

Pembahasan

A. Sejarah Kebijakan Satu Tiongkok (*One China Policy*)

Pada tahun 1887, Tiongkok dikuasai oleh orang-orang nasionalis yang dipimpin oleh Chiang Kai Shek. Namun tahun 1927, terjadi perang saudara di Tiongkok ketika masuknya dan keinginan orang-orang komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong menguasai Tiongkok. Hingga akhirnya kekalahan oleh orang-orang sosialis yang mengasingkan diri pergi ke pulau Formosa untuk membangun negara sendiri yang bernama Taiwan.¹⁴

Perginya orang-orang sosialis ke Taiwan membuat kondisi perpolitikan dan hubungan diplomatik diantara Tiongkok dan Taiwan terus mengalami pergolakan. Sejak berpisah dari Tiongkok, Taiwan hingga saat ini diakui sebagai suatu negara hanya oleh beberapa negara saja bahkan PBB hanya mengakuinya sebagai provinsi dari negara Tiongkok. Pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan yang dinamakan Kebijakan Satu Tiongkok (*One China Policy*) yang isinya menunjukkan bahwa hanya ada satu Tiongkok yang berdaulat. Jadi, keberadaan Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok dan tidak dianggap sebagai negara yang terbentuk karena dirinya sendiri di luar Tiongkok. Pemerintah Tiongkok juga mengakui atas wilayah seperti Hongkong, Macau dan Taiwan sebagai negara yang terintegrasi dengan Tiongkok. Sehingga hubungan kerjasama atau diplomatik dengan Tiongkok harus melalui satu Pemerintahan saja dan hal ini harus setidaknya disetujui oleh negara yang ingin menjalin kerjasama dengan Tiongkok.¹⁵

Kebijakan Satu Tiongkok telah berkembang dalam perjalanan perjuangan rakyat Tiongkok untuk melindungi kedaulatan Tiongkok dan integritas wilayah, baik secara *de facto* dan *de jure*. Taiwan adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Tiongkok. Semua fakta dan hukum tentang Taiwan membuktikan bahwa Taiwan

¹³ Sugiyono. "Memahami penelitian Kualitatif." Bandung. ALFABETA. 2010

¹⁴ Winoardi Grace Lestariana, "Menelisik Kedaulatan Taiwan," Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2013), diakses pada 23 Februari 2019 pukul 06:28, <http://hi.umy.ac.id/menelisik-kedaulatan-taiwan/>

¹⁵ M. Fahrezal Maulana, Kholis Roisah & Peni Susetyorini. "Implikasi *One China Policy* Terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Taiwan dalam Perspektif Hukum Internasional". *Diponegoro Law Journal* Vol.5 No.3 (2016): 4, <https://media.neliti.com/media/publications/19470-ID-implikasi-one-china-policy-terhadap-hubungan-luar-negeri-indonesia-dan-taiwan-da.pdf>

merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Tiongkok. Pada hari pendiriannya, Pemerintah Pusat Rakyat Tiongkok menyatakan kepada Pemerintah dari seluruh negara di dunia, bahwa Pemerintahan pusat rakyat Tiongkok adalah Pemerintahan yang sah dan satu-satunya yang mewakili seluruh rakyat Republik Rakyat Tiongkok. Kebijakan Satu Tiongkok artinya hanya ada satu Tiongkok, dan Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok. Masing-masing bersikeras melakukan legitimasi Pemerintah mereka masing-masing. Dengan adanya kebijakan ini, berarti bahwa negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok harus memutuskan hubungan resmi dengan Republik Taiwan.¹⁶

Secara garis besar, kebijakan tersebut dapat ditelusuri kembali ke tahun 1949 dan berakhirnya perang saudara Tiongkok. Para sosioalis yang kalah, juga dikenal sebagai Kuomintang mundur ke Taiwan, sementara itu Komunis yang menang lalu mendeklarasikan Republik Rakyat Tiongkok menjadikan wilayah Tiongkok daratan sebagai milik pusat Pemerintahan sementara. Kedua belah pihak mengatakan mereka mewakili seluruh Tiongkok. Awalnya, banyak Pemerintah termasuk Amerika Serikat mengakui Taiwan saat mereka menghindari dari Tiongkok Komunis. Tetapi angin diplomatik bergeser ketika Tiongkok dan Amerika Serikat melihat kebutuhan bersama untuk berkembang hubungan dimulai pada tahun 1970, dengan terjadinya beberapa negara memutuskan hubungan dengan Taipei untuk Beijing. Namun banyak yang masih mempertahankan hubungan informal dengan Taiwan melalui kantor perdagangan atau budaya lembaga, dan Amerika Serikat tetap menjadi sekutu di bidang keamanan paling penting Taiwan.

B. Sejarah ECFA

Kondisi Taiwan yang mengabaikan kemungkinan untuk pengasingan politik, terutama hubungan yang sering tidak nyaman dengan Tiongkok yang memainkan peran utama dalam menghambat upaya Taiwan untuk berpartisipasi dalam integrasi regional. Dengan demikian, penolakan pengakuan terhadap Taiwan telah membuat Taipei berada dalam posisi rentan dalam hal kompetisi untuk menetapkan FTA dalam wilayah Asia Pasifik, dengan kebangkitan ekonomi dan politiknya sejak 1990an, Tiongkok tetap menjadi jantung integrasi di Asia.¹⁷

¹⁶ "The One-China Principle and the Taiwan Issue," diakses pada 23 Februari 2019 pukul 08:49, <http://www.china.org.cn/english/taiwan/7956.htm>

¹⁷ T Tsai, "Cross-Strait Relations and Regional Integration: A Review of the Ma Ying-jeou Era (2008—2016)," *Journal of Current Chinese Affairs* (2017):13-14, diakses pada 24 Februari 2019 pukul 07:21, ISSN:1868-4874

Secara politis, Taipei dan Beijing sepakat untuk menyesuaikan diri dengan gagasan ambigu tentang Consensus 92, yakni pada tahun 1992 sebuah kesepakatan tercapai antara Taiwan dan Tiongkok, Koo Wang Summit antara ketua Straits Exchange Foundation Koo Chen Fu dan ketua Association for Relations Across the Taiwan Straits Wang Daohan.¹⁸ Pada pertemuan itu, kedua belah pihak setuju untuk mengakui fakta, bahwa hanya ada satu Tiongkok di dunia, tetapi belum meninggalkan ruang untuk interpretasi terhadap perwakilan resmi dari negara Tiongkok. Kesepakatan untuk tidak setuju sejalan dengan kebijakan baru Taipei yang mengesampingkan perbedaan politik, dan pada gilirannya memimpin untuk penyelesaian tiga hubungan yakni, hubungan pos, transportasi, dan perdagangan dan kerja sama fungsional seluruh Selat di bidang pariwisata, pendidikan, memerangi kriminalitas, dan keamanan pangan.¹⁹

Menyusul pergantian partai yang berkuasa pada tahun 2008, yakni Kuomintang, Pemerintah Taiwan berusaha untuk memperbaiki catatan buruk di integrasi regional dengan mencari rekonsiliasi politik dengan Tiongkok dan mengakhiri kompetisi diplomatik di Selat Taiwan. Memulai dengan menyerukan gencatan diplomatik dan menerapkan diplomasi fleksibel. Presiden Taiwan, memiliki harapan yakni meningkatkan hubungan luar negeri, dan hubungan ekonomi, dengan mengesampingkan perbedaan politik dengan Beijing untuk fokus pada potensi fungsional yakni kerja sama lintas Selat. Pada tahun 2009, presiden Taiwan menyimpulkan aspirasi diplomatik dalam frasa 16 karakter yang mendorong Taiwan dan Tiongkok untuk menghadapi kenyataan, membangun rasa saling percaya, menetapkan mengesampingkan perselisihan, dan bersama-sama membangun win-win solution.²⁰

Niat baik diungkapkan oleh Taipei di bawah Pemerintahan Ma Ying Jeou hingga akhirnya didengar oleh Beijing sehingga membangun fondasi untuk meningkatkan interaksi dan kerja sama antara Taiwan dan Tiongkok. Pada tahun 2010, dalam hal pertukaran ekonomi, setelah lima putaran pertemuan antara ketua Straits Exchange Foundation Chiang Pin Kung dan ketua Association for Relations Across the Taiwan Straits Chen Yunlin, muncul hasil dari pertemuan yakni Chiang Chen Talks

¹⁸ Xinhuanet.com, "Mainland, Taiwan organizations hold first talks in 9 years, diakses pada 6 Maret 2019 pukul 23:15, <http://www.xinhuanet.com/mainland-taiwan-organizations-hold/>

¹⁹ Ibid.

²⁰ Lee Cheng Yu, "Liangyan guanxi de fazhan yu kunjing," *The Development of Cross-Strait Relations and Its Dilemma* (2010), diakses pada 24 Februari 2019 pukul 08:23, <https://core.ac.uk/download/pdf/143832144.pdf>

sebagai bentuk kelanjutan dari Koo Wang Summit. Pembicaraan yang terhenti pada tahun 1999 lalu, dikarenakan terjadinya ketegangan politik, Taiwan dan Tiongkok membentuk dan menyetujui ECFA. Hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan hambatan dan menyadari penuh potensi ekonomi dari pergerakan barang bebas di Selat Taiwan. Di bawah ECFA, Taiwan dan Tiongkok telah menyimpulkan Early Harvest Agreement yang memungkinkan 539 produk untuk diperdagangkan melintasi Selat dengan pengurangan hambatan tarif, sementara negosiasi untuk sebuah perjanjian Formal Goods Trade Agreement terus berlanjut. Selain itu, Taiwan juga menyimpulkan kesepakatan dalam perdagangan jasa dan investasi dengan Tiongkok.

21

ECFA antara Taiwan dan Tiongkok ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2010. Sebagai ruang lingkup perjanjian termasuk pengurangan tarif, menghilangkan hambatan perdagangan non tarif, mempromosikan adanya kontak investasi perdagangan, dan meningkatkan pembangunan ekonomi serta lapangan kerja. Sebelumnya, Taiwan telah menyimpulkan FTA dengan sejumlah kecil negara di Amerika Tengah, terutama untuk politik daripada alasan ekonomi.²² Di sisi lain, tampaknya ECFA termotivasi oleh alasan ekonomi. Sejak perusahaan Taiwan bersaing dengan perusahaan dari sejumlah negara ASEAN di pasar Tiongkok, perusahaan-perusahaan Taiwan merasa cemas tentang posisi mengenai akses pasar. Oleh karena itu, Taiwan menyimpulkan ECFA dengan Tiongkok untuk mengatasi kelemahan ini di pasar Tiongkok.²³

ECFA yakni sebuah perjanjian yang paling penting antara kedua rival politik sejak terjadinya perang saudara Tiongkok pada akhir tahun 1949. ECFA dimaksudkan untuk membentuk integrasi ekonomi lintas Selat Taiwan dengan perjanjian kerangka kerja. ECFA tidak hanya berfungsi sebagai kesepakatan perdagangan bilateral pertama antara Tiongkok dan Taiwan, dengan puluhan tahun perselisihan kedaulatan di dunia Internasional, tetapi juga suatu perjanjian kerangka kerja yang melambangkan bahwa Taiwan mengakui perlunya membangun sebuah platform kerja sama yang dilembagakan dengan mitra dagang terbesarnya yakni Tiongkok, dan sebagai upaya

²¹ *ibid*

²² Dent Christopher M. "Taiwan and the New East Asian Regionalism." *Issues & Studies* 45 (2009): 144-55, diakses tanggal 24 Februari 2019 pukul 09:13, <http://140.119.170.21/attachments/journal/add/107-158.pdf>

²³ Chen Shin-Hong, Meng-Chun Liu, and Pei-Chang Wen. "The ECFA and Its Effect on Cross-strait Trade and Investment: A Taiwanese Perspective." *China Economic Journal* 4 (2011): 105-24, diakses pada 24 Februari 2019 pukul 09:48, doi:10.1080/17538963.2011.666060

anti marginalisasi dalam integrasi regional Asia Timur yang dimulai oleh pembentukan FTA ASEAN.

C. Upaya Tiongkok Merealisasikan *One China Policy* Melalui ECFA

Sebagaimana konsep Diplomasi Komersial yang dikemukakan oleh Evan Potter, peneliti melihat bahwa, Tiongkok melakukan beberapa upaya yang menunjukkan adanya *Value Chain of Diplomacy Commercial* terhadap Taiwan. Tiongkok memiliki akses pasar yang besar yang dibutuhkan oleh Taiwan untuk memajukan perekonomiannya. Dalam konsep ini, Tiongkok berusaha memfasilitasi kebutuhan Taiwan, yang menjadi keunggulan dari Tiongkok serta yang menjadi kekurangan Taiwan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kolaborasi antara Pemerintah Tiongkok dengan *government objective* dan pelaku bisnis terhadap Taiwan.

1) Intelligence

Dari segi *government objectives*, sesuai dengan konsep diplomasi komersial Evan Potter, intelligence yakni pencarian kedalaman informasi dan mengurus segala aspek yang akan dibutuhkan dalam tujuan membangun bisnis antara home country dengan host country. Dalam penelitian ini Taiwan sebagai home country, dan Tiongkok sebagai host country. Pencarian informasi tersebut berupa pemberian laporan tentang kesempatan bisnis, pengembangan dan kebutuhan perusahaan, informasi terkait peraturan bisnis.²⁴ Pemerintah Tiongkok berusaha menggali informasi tentang apa saja yang dibutuhkan Taiwan, sehingga ECFA akan diarahkan untuk hal itu. Salah satu upaya Pemerintah Tiongkok untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan Taiwan yakni, pada bulan Desember tahun 2009, Wang Yi sebagai direktur Kantor Urusan Taiwan, Komite Partai Komunis Tiongkok, menyelenggarakan Forum Budaya Ekonomi dan Perdagangan Lintas Selat Keempat yang diselenggarakan di Shanghai. Wang Yi mengumumkan bahwa Bank Industri Komersial Tiongkok, dan Bank Tiongkok masing-masing akan membiayai perusahaan Taiwan yang berbasis di Tiongkok dengan 50 miliar Renminbi. Tiongkok akan mendukung dan membantu perusahaan Taiwan yang berbasis di Tiongkok untuk menyesuaikan dan meningkatkan struktur

²⁴ Larissa Moss. "Business Intelligence Roadmap: The Complete Project Lifecycle for Decision-Support Applications." Addison Wesley Professional (2003). diakses pada 13 Juni 2019 pukul 01:53, <https://trove.nla.gov.au/work/16488348?selectedversion=NBD24090247>

produksinya, dan mendorong mereka untuk mengambil bagian dalam proyek teknologi tinggi.²⁵

Pemerintah Tiongkok mendapatkan informasi dari hasil upaya intelligence sebagai realisasi ECFA, menemukan lima kebutuhan Taiwan dalam bidang Pertanian, Elektronik dan IT, Logistik, Infrastruktur dan Financial Services. Lima bidang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:²⁶

a) Pertanian

Tiongkok diharapkan menghapuskan tarif pada lebih dari 40 produk pertanian dari Taiwan termasuk buah-buahan, sayuran dan produk-produk akuakultur. Di sisi lain, bertujuan untuk melindungi kepentingan petani lokal Taiwan, para pihak telah sepakat untuk peningkatan pada produk pertanian dari Taiwan di pasar Tiongkok, yang pada gilirannya akan sangat meningkatkan industri pertanian di Taiwan.

b) Elektronik & IT

Tiongkok diharapkan memberikan akses kemudahan bagi teknologi dari Taiwan untuk diimpor ke Tiongkok, yang mempertahankan pusat manufaktur dunia serta pasar terbesar dunia untuk produk-produk elektronik. Taiwan juga mengharapkan kemungkinan untuk memperbaiki rantai industri IT menjadi lebih komprehensif dan hemat biaya di wilayah Tiongkok yang lebih besar.

c) Logistik

Tiongkok diharapkan untuk mengurangi dan menghilangkan sebagian besar tarif untuk angkutan barang dari Taiwan. Di sisi lain, secara substansial menyederhanakan prosedur bea cukai dan memperpendek perkiraan waktu. Akibatnya, bisnis logistik yang memiliki teknologi hemat biaya akan mendapat manfaat paling banyak.

d) Infrastruktur

Sebagai pemanfaatan hubungan ekonomi yang lebih

²⁵ Zhao Hong, "Taiwan Mainland Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA): Implication for Cross Straits Relations." EAI Background Brief No.452. 2009. Diakses pada 7 Juli 2019, pukul 01:19. <http://www.eai.nus.edu.sg/publications/files/BB452.pdf>

²⁶ Diaz Reus, "Beijing and Taiwan Work Close to Bring More Opportunities to China". Diakses pada 25 Mei 2019 pukul 20:12. <http://diazreus.com/beijing-and-taiwan-work-closer-to-bring-more-opportunities-to-china/>

dekat dengan Taiwan, Tiongkok diharapkan bisa menarik pebisnis Taiwan untuk berinvestasi dalam infrastruktur di Tiongkok. Beberapa proyek yang dibuka untuk Taiwan bahkan mungkin tidak dapat diakses oleh investor dari negara lain. Akibatnya, Taiwan menjadi platform yang menarik bagi investor untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur Tiongkok yang masih terbatas pada asing. Hal tersebut dapat membantu keadaan infrastruktur Tiongkok yang masih kurang berkembang di sebagian besar wilayahnya.

e) *Financial dan Services*

Tiongkok diharapkan mampu membuka pasar keuangan bagi pebisnis Taiwan, terutama di industri perbankan dan industri perusahaan pembiayaan. Bisnis keuangan dari Taiwan diharapkan menerima perlakuan yang jauh lebih menguntungkan di Tiongkok daripada investor dari bagian negara lain. Tiongkok diharapkan memberikan manfaat bagi layanan profesional lainnya di Taiwan. Misalnya, Beijing akan membuat prosedur persetujuan yang dipercepat untuk bisnis perawatan kesehatan Taiwan yang ingin berinvestasi dan berekspansi di Tiongkok.

Setelah mengetahui informasi mengenai beberapa bidang yang dibutuhkan oleh Taiwan. Dari kegiatan government objectives yang pertama, sesuai dengan konsep diplomasi komersial Evan Potter, intelligence, bahwa terdapat lima bidang kebutuhan Taiwan yang dijadikan keutamaan dan Pemerintah Taiwan ingin membantu pelaku bisnisnya mengembangkan industri di luar Taiwan.

2) *Networking and Public Relations*

Selanjutnya, kebutuhan adanya mitra bisnis dan membangun hubungan masyarakat yang merupakan strategi penting bagi promosi investasi, yang meliputi pengembangan relasi bisnis dengan perusahaan dan menghadiri forum bisnis di home atau host country. Hal ini berkenaan dengan upaya kedua negara agar terjalin suatu hubungan perdagangan yang lebih intensif. Dalam penelitian ini, strategi penting bagi promosi investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok untuk menarik investor dari Taiwan, meliputi pengembangan relasi bisnis dan hadir dalam pertemuan forum bisnis di

Tiongkok maupun di luar Tiongkok. Peneliti menemukan upaya Pemerintah Tiongkok dalam merealisasikan ECFA sesuai dengan konsep diplomasi komersial Evan Potter yakni, seperti yang tercantum dalam ECFA pada Bagian 3, Pasal 6 yang berbunyi:⁵⁶

Kerjasama Ekonomi

- a) Untuk meningkatkan dan memperluas manfaat dari Perjanjian ini, kedua Pihak telah sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang-bidang termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:
 - Perlindungan dan kerja sama hak kekayaan intelektual;
 - Kerja sama keuangan;
 - Promosi dan fasilitasi perdagangan;
 - Kerja sama pabean;
 - Kerjasama e-commerce;
 - Diskusi tentang pengaturan keseluruhan dan bidang utama untuk industri kerjasama, promosi kerja sama dalam proyek-proyek besar, dan koordinasi resolusi masalah yang mungkin timbul dalam perjalanan kerja sama industri antara kedua Pihak;
 - Promosi kerjasama usaha kecil dan menengah antara dua Pihak, dan peningkatan daya saing perusahaan-perusahaan ini;
 - Promosi pembentukan kantor bersama oleh ekonomi dan perdagangan tubuh kedua Pihak.
- b) Kedua pihak akan segera melakukan konsultasi pada program-program khusus dan isi masalah kerja sama yang tercantum dalam Pasal ini.

Dari upaya Pemerintah Tiongkok yang tercantum dalam ECFA pada Bagian 3, Pasal 6 telah menjelaskan beberapa panduan dalam melaksanakan upaya Pemerintah melalui *networking and public relations* sesuai konsep diplomasi komersial Evan Potter yang wajib untuk dipatuhi oleh kedua pihak. Pemerintah Tiongkok dalam upayanya merealisasikan ECFA sebagai usaha dalam pengembangan relasi bisnis dan menghadiri forum bisnis diantaranya adalah:

- a) Pada Juni tahun 2013, Pemerintah provinsi Fujian, Tiongkok

memperkuat hubungan dengan Taiwan dengan memberi Taiwan tiga panda merah dan memberikan bantuan kepada usaha kecil dan menengah Taiwan yang beroperasi di provinsi tersebut. Pingtan Experimental Zone di provinsi Fujian, Tiongkok akan berfungsi sebagai model pertukaran ekonomi lintas selat, bersumpah untuk membangunnya menjadi taman industri berbasis ilmu pengetahuan yang akan menarik investasi Taiwan.²⁷

- b) Pada Oktober 2013, di lobi hotel pada sela pertemuan APEC Indonesia 2013 di pulau Bali, Indonesia, Wang Yu Chi, China Mainland Affairs Council Minister, berbicara singkat dengan Zhang Zhijun, Office Minister of Taiwan Affairs, masing-masing menyapa dengan gelar resminya. Keduanya menyerukan pembentukan mekanisme dialog reguler antara kedua lembaga mereka untuk memfasilitasi keterlibatan lintas selat. Zhang juga mengundang Wang untuk mengunjungi Tiongkok.²⁸
- c) Pada 11 Februari 2014, di Tiongkok Timur tepatnya di kota Nanjing, Perwakilan Taiwan dan Tiongkok mengadakan pembicaraan resmi pertama mereka sejak berakhirnya perang saudara Tiongkok tahun 1949, yang melibatkan pejabat tinggi hubungan antarselat dari kedua negara yakni, Wang Yu Chi dan Zhang Zhijun. Sebuah pertemuan yang diharapkan menghasilkan beberapa hasil nyata tetapi satu yang merupakan perkembangan simbolis dalam pelonggaran terhadap persaingan lama kedua belah pihak yakni, Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya yang akhirnya harus dipersatukan kembali. Ini telah bereaksi dengan amarah di masa lalu terhadap langkah-langkah yang terlihat seperti memindahkan pulau yang diperintah secara mandiri menuju kemerdekaan formal. Sejak pemilihan presiden Ma Ying Jeou pada tahun 2008, yakni presiden yang mendukung agar hubungan lebih dekat dengan Tiongkok, Beijing telah mengambil pendekatan yang lebih damai. Pada tahun 2013,

²⁷ Huang Chi Kuan, "China unveils 31 measures to promote exchanges with Taiwan." Focus Taiwan News Channel. 2013, diakses pada 31/03/2019 pukul 21:16, <http://focustaiwan.tw/news/aall/201306160027.aspx>

²⁸ Jay Chou, "Taiwan, Chinese ministers meet in groundbreaking first." Focus Taiwan News Channel. 2013, diakses pada 29 Maret 2019 pukul 12:23. <http://focustaiwan.tw/news/acs/201310060010.aspx>

perdagangan lintas selat hampir dua kali lipat selama masa kepresidenan Ma, mencapai 197 miliar dollar. Pada tahun 2013, hampir tiga juta orang Tiongkok melakukan perjalanan ke Taiwan sekaligus merupakan kelompok pengunjung terbesar, hal tersebut terjadi karena sejak tahun 2008 pasca terjadinya pelonggaran pembatasan kedatangan Taiwan ke Tiongkok.²⁹

Meskipun pembicaraan hanya berlangsung selama dua jam, kedua pihak sudah melakukan terobosan besar dalam hubungan antara Tiongkok dan Taiwan sejak 1949 dan pertemuan formal pertama antara kedua pihak. Dalam dua dekade terakhir, hanya dialog resmi semu yang telah dibuat antara kedua sisi selat tersebut. Lintas Selat telah saling bernegosiasi sebagai dua kepala organisasi resmi semu. Dua pejabat menteri saling menyebut gelar resmi, yang tampaknya menandai pernyataan Ma Ying Jeou tentang hubungan hukum antara kedua sisi selat bahwa, kedaulatan tidak saling mengenal, dan menduduki kekuasaan untuk tidak saling menyangkal.³⁰

- d) Pada tahun 2015, terjadi pertemuan Ma dan Xi di Singapura, Xi dan Ma bertemu dan berjabat tangan di Singapura, menandai pertemuan pertama antara para pemimpin kedua belah pihak sejak berakhirnya Perang Saudara pada tahun 1949. Mereka bertemu dalam kapasitas mereka masing-masing sebagai pemimpin Tiongkok dan pemimpin Taiwan.³¹ Pada 30 Desember 2015, hotline yang menghubungkan kepala China Affairs Council dan kepala Taiwan Affairs Office didirikan. Percakapan pertama melalui hotline antara kedua kepala dilakukan pada 5 Februari 2016.³²
- e) Pada bulan Maret tahun 2016, mantan Taiwan Justice Minister, Luo Ying Shay memulai kunjungan bersejarah 5 hari ke

²⁹ "Taiwan Profile." British Broadcasting Corporation. diakses pada 5 April 2019 pukul 20:22 <https://www.bbc.com/news/world-asia-16178545>

³⁰ Zhang Dongyang. "不加引号的台湾部长". New York Times. 2014. diakses pada 5 April 2019 pukul 23:16. <https://cn.nytimes.com/china/20140213/cc13taiwan>

³¹ Lee Shu Hua. "President Ma to meet China's Xi in Singapore Saturday." Focus Taiwan News Channel. 2015. diakses pada 31 Maret 2019 pukul 22:09. <http://focustaiwan.tw/news/afav/201511040001.aspx>

³² Staff Writer. "China Picks Up Hotline Call." Taipei Times. 2016. diakses pada 31 Maret 2019 pukul 22:12. <http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2016/02/06/2003638953>

Tiongkok, menjadikannya Menteri pertama Pemerintah Republik Taiwan yang mengunjungi Tiongkok setelah berakhirnya Perang Sipil Tiongkok pada tahun 1949.³³

3) Contract Negotiator of Implementation

Kegiatan ini adalah negosiasi bisnis terhadap Pemerintah atau perusahaan dari *host country*. Hal ini sangat penting dalam diplomasi komersial yang menyangkut hubungan pebisnis dan Pemerintah antara *host country* dengan *home country*. Dalam penelitian ini, menyajikan hasil negosiasi antara Pemerintah Tiongkok dengan Pemerintah Taiwan, Pemerintah Tiongkok dengan investor Taiwan, dan Pemerintah Taiwan dengan investor Tiongkok. Peneliti menemukan upaya Pemerintah Tiongkok dalam merealisasikan ECFA. Sebagai usaha negosiasi bisnis yang sesuai dengan konsep diplomasi komersial Evan Potter, kedua pihak membentuk dua perjanjian tindak lanjut dibawah ECFA sebagai berikut:

a) *Cross Strait Bilateral Investment Protection and Promotion Agreement* Tahun 2012

Pada 9 Agustus 2012, telah didirikan *Cross Strait Bilateral Investment Protection and Promotion Agreement* sebagai tujuan untuk melindungi hak dan kepentingan investor di seluruh Selat Taiwan, mempromosikan investasi bersama, menciptakan lingkungan investasi yang tidak memihak, dan meningkatkan kemakmuran ekonomi lintas selat, sesuai dengan ECFA. *Straits Exchange Foundation and Association for Relations* mencapai kesepakatan yang disebut *Cross Strait Bilateral Investment Protection and Promotion Agreement*. Dalam perjanjian ini, investasi adalah setiap jenis aset yang diinvestasikan oleh investor dari kedua pihak harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Karakteristik investasi yang disepakati tidak hanya terbatas, pada berikut ini:³⁴

³³ Hsiang Cheng Chen. "Minister of Justice Heads to China on Historic Visit." *Taipei Times*. 2016. diakses pada 31 Maret 2019 pukul 22:17. <http://www.taipetimes.com/News/front/archives/2016/03/29/2003642679>

³⁴ Chairmant Straits Exchange Foundation. "Cross-Strait Bilateral Investment Protection and Promotion Agreement". *Association for Relations Across the Taiwan Straits*. diakses pada 5 April 2019 pukul 14:12. www.ecfa.org.tw/Download.aspx?No=24&strT=DMAAd

- Properti bergerak dan tidak bergerak serta hak properti lainnya;
- Saham, kontribusi modal, dan bentuk lain dari penyertaan modal dalam enterprise;
- Klaim moneter atau klaim lain untuk setiap kinerja yang memiliki nilai ekonomi;
- Hak kekayaan intelektual, nama perusahaan dan nama dagang;
- Konstruksi, manajemen, produksi, bagi hasil, dan hak kontrak serupa lainnya;
- Konsesi, termasuk konsesi untuk pembibitan dan budidaya serta untuk eksplorasi, penambangan, ekstraksi, atau eksploitasi sumber daya alam; dan
- Semua jenis obligasi yang dijamin, surat utang, pinjaman, dan bentuk utang lainnya

Karakteristik suatu investasi berarti komitmen modal atau sumber daya lainnya dan ekspektasi pengembalian atau laba. Serta karakteristik suatu investasi tidak akan terpengaruh jika terdapat asumsi terhadap risiko perubahan bentuk modal investasi yang dilakukan sesuai dengan hukum dan regulasi tempat investasi dilakukan.

Pada ruang lingkup praktik dan pengecualian, perjanjian ini berlaku untuk tindakan yang diadopsi dari investasi mereka yang dikelola oleh suatu pihak menuju investor pihak lain. Perjanjian ini berlaku untuk investasi yang dilakukan oleh investor dari kedua pihak sebelum atau setelah perjanjian ini mulai berlaku, tetapi tidak berlaku untuk sengketa investasi, sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian yang telah diselesaikan sebelum perjanjian ini mulai berlaku. Perjanjian ini berlaku untuk tindakan yang diadopsi atau dikelola oleh otoritas dari semua tingkatan dari salah satu pihak dan oleh institusi yang diotorisasi oleh pihak tersebut. Suatu pihak dapat mengadopsi, memelihara, atau menegakkan tindakan apa

pun yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan keamanan esensial. Suatu pihak dapat mengadopsi atau mempertahankan tindakan pembatasan pada investasi berdasarkan prinsip non sewenang-wenang dan tidak dapat dibenarkan adanya diskriminasi, dan asalkan tindakan tersebut tidak melarang pembatasan terselubung pada perdagangan atau investasi.³⁵

Dalam pengurangan batasan investasi secara bertahap, kedua pihak sepakat untuk menerima dan melindungi investasi bersama, tentu investasi yang memiliki timbal balik dan saling menguntungkan. Kedua pihak sepakat untuk secara bertahap mengurangi atau menghilangkan pembatasan investasi, untuk menciptakan lingkungan investasi yang adil, dan untuk berusaha mempromosikan investasi bersama. Kedua pihak menyetujui penyederhanaan dokumentasi secara bertahap terhadap aplikasi investasi dan prosedur pemeriksaan. Kedua pihak sepakat untuk memberikan fasilitasi investasi kepada pihak lainnya, masing-masing pihak akan memberikan fasilitasi kepada investor dari pihak lain, memiliki informasi investasi, lisensi operasi yang relevan, personil masuk dan keluar, dan operasi serta manajemen bisnis. Kedua pihak akan memfasilitasi pengorganisasian dan memberikan layanan simposium, seminar dan kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi investasi untuk pihak lainnya juga investornya. Jika seorang investor dari salah satu pihak menderita kerugian sehubungan dengan investasi atau pengembaliannya di pihak lain karena konflik bersenjata dan keadaan darurat atau kejadian serupa itu berlangsung di pihak lain, pihak lainnya akan memberikan ganti rugi, kompensasi, atau resolusi lain yang tidak kalah menguntungkan dari yang diberikan untuk investor itu sendiri atau investor pihak ketiga mana pun dalam situasi yang serupa, mana pun yang paling menguntungkan bagi

³⁵ Qing. “台湾投资者：如何在大陆保护你的投资：简析《海峡两岸投资保护和促进协议》”.

Zhong Lun Law Firm. diakses pada 5 April 2019 pukul 11:12.
<http://www.zhonglun.com/UpFile/File/201308061453071610.pdf>

investor.³⁶

b) *Cross Strait Services Trade Agreement Tahun 2013*

Cross Strait Service Trade Agreement (CSSTA) yang ditandatangani pada 21 Juni 2013 di Hotel Dong Jiao State Guest Shanghai, yang ditandatangani oleh ketua Straits Exchange Foundation, Lin Join Sane dan Association for Relations Across the Taiwan Straits, Chen Deming. CSSTA adalah satu dari perjanjian tindak lanjut di bawah ECFA. CSSTA akan membuka 64 sektor layanan di Taiwan ke Tiongkok dan 80 sektor layanan di Tiongkok ke Taiwan. Sektor layanan Taiwan sebagian besar terdiri dari usaha kecil dan menengah (UKM). Di tahun 2012, 98% perusahaan Taiwan dalam layanan adalah UKM, yang menyediakan pekerjaan hingga 84% dari tenaga kerja sektor ini. Namun, UKM ini menyumbang hanya 31% dari penjualan domestik dan 13% dari ekspor Taiwan. Antara tahun 2009 dan 2013, investasi Tiongkok di sektor layanan Taiwan berjumlah hingga 547 juta US dollar. Investasi Tiongkok dalam layanan Taiwan terkonsentrasi di perdagangan grosir dan eceran (28% dari total investasi Tiongkok di layanan Taiwan), pelabuhan 25% dan perbankan 25%.³⁷ Meskipun beberapa perusahaan kecil akan menghadapi potensi persaingan dari Tiongkok, perusahaan Taiwan lainnya kemungkinan akan mendapat manfaat dari pergeseran dari domestik pasar kecil ke pasar Tiongkok yang sangat besar. CSSTA juga akan memungkinkan Tiongkok untuk mendapatkan manfaat dari transfer teknologi dari investasi Taiwan dalam layanan yang bernilai tambah tinggi.³⁸

CSSTA menetapkan secara tertulis berbagai hal yang berkaitan dengan tahapan mengurangi atau menghilangkan

³⁶ Chairmant Straits Exchange Foundation. "Cross-Straits Bilateral Investment Protection and Promotion Agreement". Association for Relations Across the Taiwan Straits. diakses pada 5 April 2019 pukul 16:41. www.ecfa.org.tw/Download.aspx?No=24&strT=DMA

³⁷ Bureau of Foreign Trade, Ministry of Economic Affairs. diakses pada 5 April 2019 pukul 11:23 <https://cus93.trade.gov.tw/>

³⁸ Chiang Min Hua. "The Controversial Cross Straits Service Trade Agreement". EAI Background Brief No. 919. 2014. Diakses pada 4 April 21:34. <http://www.eai.nus.edu.sg/publications/files/BB919.pdf>

pembatasan perdagangan jasa di seluruh Selat Taiwan. Ini akan membantu bisnis lokal memperluas pangsa pasar mereka di pasar Tiongkok dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi Taiwan. Perjanjian ini dibagi menjadi tiga bagian yakni, teks, the Schedules of Specific Commitments on Trade in Services, dan the Specific Provisions of Service Suppliers. Teks tersebut menuliskan penetapan aturan tentang hal-hal yang mempengaruhi perdagangan jasa dan berbagai kewajiban yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Hal-hal yang mempengaruhi perdagangan jasa seperti persyaratan transparansi, pengaturan tindakan administrasi, pencegahan persaingan tidak sehat, mekanisme negosiasi darurat, pergerakan bebas pembayaran dan transfer modal, asas adil dan perlakuan yang adil dan topik penting lainnya yang prihatin dengan pemasok layanan bagi Taiwan. Kedua pihak menegosiasikan sejumlah besar sektor jasa, termasuk layanan bisnis; layanan komunikasi; konstruksi dan jasa teknik terkait; layanan distribusi; pelayanan lingkungan; layanan yang berhubungan dengan kesehatan dan sosial; pariwisata dan layanan terkait perjalanan; layanan rekreasi, budaya, dan olahraga; jasa transportasi; dan jasa keuangan. Kedua pihak membuat komitmen untuk menghilangkan atau mengurangi batasan partisipasi ekuitas, memperluas ruang lingkup bisnis di Tiongkok berdasarkan ketentuan geografi atau lini bisnis, dan melakukan fasilitasi tindakan perdagangan.³⁹

CSSTA menawarkan layanan pemudah akses kedua pihak yang lebih baik ke layanan pasar masing-masing. Kedua pihak juga akan meningkatkan transparansi aturan perdagangan dalam layanan serta bantuan penyedia layanan dari kedua belah pihak untuk melakukan bisnis. Selain itu, CSSTA menandai langkah- langkah utama bagi Taiwan untuk bergabung dengan integrasi ekonomi regional dan

³⁹ “Ministry of Economic Affairs Taiwan”. diakses pada 5 April 2019 pukul 15:22. www.ecfa.org.tw/Download.aspx?No=34&strT=ECFADoc

menandatangani perjanjian dagang dengan mitra dagang. Dalam perjanjian ini, kedua pihak telah memperluas cakupan area yang terbuka untuk investasi Tiongkok, termasuk konsultasi manajemen, iklan, layanan riset pasar, pengujian dan analisis teknis, jasa konsultasi terkait dengan sains dan teknologi, pengemasan, pencetakan, layanan pameran, pengeditan milis, telekomunikasi, pertanahan pengangkutan jasa kurir, kuota impor film, jasa konstruksi, layanan lingkungan, layanan rumah sakit, layanan sosial, agen perjalanan layanan, pengoperasian teater dan fasilitas olahraga, penjualan dan pemasaran layanan transportasi udara, layanan penyimpanan dan pergudangan, transportasi barang layanan keagenan, layanan cuci dan kebersihan, tata rambut dan layanan kecantikan lainnya, asuransi, layanan pemakaman dan krematorium, perbankan, dan layanan sekuritas. Dengan ruang lingkup yang diperluas terbuka untuk investasi Tiongkok, dan juga berharap dapat menarik lebih banyak investasi dari luar negeri di Taiwan.⁴⁰

Mempertimbangkan sifat progresif dari layanan liberalisasi, CSSTA termasuk artikel untuk mengamankan akses negosiasi pasar berdasarkan konsensus di masa depan. Perjanjian ini juga akan mengatur mekanisme komunikasi antara kedua belah pihak untuk memantau pelaksanaan. Kedua belah pihak akan fokus pada negosiasi Agreement on Trade in Goods, yang akan memperbaiki akses pasar di daratan untuk produk-produk Taiwan. Dengan menandatangani CSSTA, diharapkan untuk mengirim sinyal kuat kepada dunia bahwa kedua belah pihak Selat Taiwan menanti perdamaian dan kemakmuran. Dengan dorongan pembangunan ini, kedua pihak berharap bahwa lebih banyak negara akan bersedia untuk membahas perjanjian kerja sama ekonomi.⁴¹

Selain dua perjanjian diatas yang termasuk perjanjian tindak lanjut dari ECFA, peneliti menemukan kebijakan insentif ekonomi sebagai upaya

⁴⁰ ibid

⁴¹ ibid.

Pemerintah Tiongkok dalam realisasi ECFA yang sesuai dengan konsep diplomasi komersial Evan Potter. Kebijakan insentif ekonomi yang dijalankan oleh Pemerintah Tiongkok membuat hubungan ekonomi antara Tiongkok dan Taiwan menjadi semakin erat. Tiongkok menjadi tempat favorit bagi kalangan industri dan pengusaha Taiwan untuk menanamkan modalnya. Tercatat sebanyak 70% dari seluruh arus penanaman modal asing yang dilakukan oleh investor Taiwan memilih Tiongkok sebagai tempat tujuan untuk menanamkan modalnya. Terdapat lebih dari 70.000 perusahaan milik investor asal Taiwan yang beroperasi di Tiongkok.⁴² Ada beberapa kebijakan insentif ekonomi yang dijalankan oleh Pemerintah Tiongkok antara lain:⁴³

- a) Pemberian jaminan keamanan dan perlindungan penuh terhadap modal asing yang ditanam oleh investor asal Taiwan di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa berbagai peraturan dan regulasi telah dibuat untuk memberi jaminan keamanan dan perlindungan bagi modal yang ditanam oleh investor asal Taiwan di Tiongkok.
- b) Pemberian fasilitas preferential treatment bagi investor asal Taiwan untuk menarik minat kalangan industri dan pengusaha Taiwan agar menanamkan modalnya di Tiongkok. Fasilitas preferential treatment yang diberikan oleh Pemerintah Tiongkok seperti insentif pajak berupa corporate income tax rate yang rendah. Insentif pajak lainnya seperti tax holiday diberikan oleh Pemerintah Tiongkok agar investor asal Taiwan tertarik menanamkan modalnya di Tiongkok.
- c) Penyediaan dana pinjaman bagi investor asal Taiwan. Pejabat Tiongkok, Yang Yi, menyatakan bahwa Bank Pembangunan Tiongkok dan Bank Huaxia telah mengucurkan dana sebesar 8 miliar yuan atau sekitar 1 miliar US dollar khusus bagi investor asal Taiwan yang mengajukan pinjaman dana finansial.

⁴² Gareth Banning, "Taiwan In Search of a Strategic Consensus." Atlantic Council, 2006. Diakses pada 30 Maret 2019 pukul 22:12. <https://www.atlanticcouncil.org/publications/issue-briefs/taiwan-in-search-of-a-strategic-consensus>

⁴³ "Taiwan Affairs Office." diakses pada 31 Maret 2019 pukul 23:58. http://www.gwytb.gov.cn/en/CrossstraitTrade/201103/t20110316_1788922.htm

- d) Menawarkan lahan dengan harga sewa yang rendah kepada investor asal Taiwan yang ingin mendirikan perusahaan di Tiongkok.
- e) Memberikan fasilitas preferential treatment bagi produk pertanian Taiwan yang efektif berlaku sejak bulan Agustus tahun 2005. Beberapa produk pertanian Taiwan yang menikmati fasilitas preferential treatment dari Pemerintah Tiongkok sebagian besar adalah jenis buah-buahan seperti mangga, nanas, jeruk, jambu biji, dan belimbing. Kebijakan preferential treatment yang diberikan oleh Pemerintah Tiongkok terhadap produk pertanian Taiwan seperti pembebasan hambatan tarif dan pajak impor.

Peneliti juga menemukan salah satu upaya Pemerintah Tiongkok merealisasikan ECFA sebagai usaha negosiasi bisnis yang sesuai dengan konsep diplomasi komersial Potter. Pada 1 Mei 2009, hubungan keuangan antara kedua bidang membaik dalam suatu langkah dalam regulator keuangan Taiwan mengumumkan bahwa, investor Tiongkok akan diizinkan untuk berinvestasi di pasar uang Taiwan untuk pertama kalinya sejak 1949. Investor sekarang dapat mengajukan permohonan untuk membeli saham Taiwan yang tidak melebihi sepersepuluh dari nilai total saham perusahaan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian peringanan dari pembatasan investasi Tiongkok. Ekonom Taipei Liang Chi Yuan, memberi komentar bahwa, faktor risiko Taiwan sebagai titik nyala telah menurun secara signifikan dengan hubungan yang membaik dengan Tiongkok. Orang Tiongkok akan ragu-ragu melancarkan perang karena investasi mereka meningkat di sini. Perusahaan telekomunikasi terbesar Tiongkok, China Mobile adalah perusahaan pertama yang memanfaatkan gerakan baru ini dengan membelanjakan 529 juta dollar untuk membeli 12 persen Far EasTone yakni operator telekomunikasi terbesar ketiga di Taiwan.⁴⁴

Selanjutnya peneliti juga menemukan salah satu upaya Pemerintah Tiongkok merealisasikan ECFA sebagai usaha negosiasi bisnis yang sesuai dengan konsep diplomasi komersial Potter. Pada Juni tahun 2013, Tiongkok

⁴⁴ Jane Macartney. "Taiwan opens up to mainland Chinese investors." The Times. London. 2009. diakses pada 29 Maret 2019 pukul 14:55. <https://web.archive.org/web/20090508083450/http://business.timesonline.co.uk/tol/business/economics/article6199775.ece>

menawarkan langkah baru untuk mengintegrasikan ekonomi Taiwan. Menurut laporan Huang Chi Kuan, langkah-langkah baru meliputi:⁴⁵

- a) Memfasilitasi perjalanan dan meningkatkan kenyamanan, misalnya dengan meningkatkan dari sembilan menjadi 20 jumlah provinsi dan kota di mana warga negara Taiwan dapat mengajukan dokumen perjalanan baru yang memungkinkan mereka untuk masuk dan keluar dari Tiongkok;
- b) Mengizinkan warga negara Tiongkok yang memenuhi syarat di 31 provinsi dan kota untuk mengajukan dokumen perjalanan untuk mengunjungi Taiwan, terlepas dari lokasi tempat tinggal resmi mereka;
- c) Memperpanjang daya maksimum kunjungan ke kota Kinmen oleh penduduk kota Xiamen dari satu hari menjadi dua hari;
- d) Mempromosikan lalu lintas jalur pelayaran dan pengembangan pengiriman penumpang dan kargo melintasi Selat Taiwan;
Memperluas peluang kerja bagi orang Taiwan di Tiongkok, termasuk membuka ujian sertifikasi 10 profesi untuk penduduk Taiwan dan memberikan dukungan kepada orang Taiwan yang ingin memulai bisnis di Tiongkok setelah mendapatkan gelar. 10 profesi termasuk komunikasi, penerbitan, konsultasi manajemen, pembuatan prosthetics, evaluasi tahan gempa untuk bangunan, pengawas peralatan, insinyur metrologi bersertifikat;
- e) Evaluasi dari 13 kota lain termasuk Shenyang, Zhengzhou, Wuhan yang akan diizinkan untuk melakukan perjalanan ke Taiwan karena turis independen dan jumlah agen perjalanan yang diizinkan untuk mengatur wisata kelompok ke Taiwan juga akan meningkat;
- f) Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok akan mengeluarkan

⁴⁵ Huang Chi Kuan. "China unveils 31 measures to promote exchanges with Taiwan." Focus Taiwan News Channel. 2013. diakses pada 31 Maret 2019 pukul 21:16. <http://focustaiwan.tw/news/aall/201306160027.aspx>

penjelasan yang memungkinkan pengakuan dan penegakan penyelesaian sipil yang dicapai oleh komite mediasi dari kota-kota lokal Taiwan, untuk melindungi hak-hak rakyat dengan lebih baik;

- g) Meningkatkan jumlah pangkalan yang ditunjuk untuk pertukaran resmi lintas selat dari 17 menjadi 28, dengan yang baru termasuk Kuil Konfusius di Provinsi Shandong dan Mausoleum;

Pembentukan 10 pangkalan pertama yang ditunjuk untuk pertukaran resmi budaya lintas selat, termasuk Museum Seni Nasional Tiongkok dan Cultural Friendship Association di Provinsi Henan; dan

- h) Pembentukan National Cross Strait Copyright Trade Center dan basis untuk industri penerbitan digital di Provinsi Fujian.

Setelah mengetahui negosiasi 5 bidang yang dibutuhkan oleh Taiwan. Dari kegiatan government objectives yang kedua, sesuai dengan konsep diplomasi komersial Potter, *contract negotiator of implementation*, bahwa terdapat 5 bidang kebutuhan Taiwan yang dijadikan keutamaan yang dapat terpenuhi melalui kebijakan insentif Tiongkok dan beberapa tawaran langkah baru untuk mengintegrasikan dengan ekonomi Taiwan.

4) Problem Solving

Keempat adalah penyelesaian masalah dalam bisnis sangat dibutuhkan yang terkait dengan peraturan di *host country* yang memiliki peluang untuk merugikan pebisnis dari *home country* dan permasalahan lain yang berhubungan dengan laju aktivitas bisnis kedua pihak. Taiwan harus bekerja sama dengan Tiongkok untuk meningkatkan resolusi hubungan bilateral. Selama Pemerintahan Ma, Tiongkok dan Taiwan tumbuh lebih dekat melalui banyak kebijakan ekonomi. Hubungan antara Taiwan dan Tiongkok dapat ditingkatkan melalui negosiasi dan mediasi karena alternatif penyelesaian sengketa tersebut metode dapat mengarah pada hasil yang memuaskan untuk kedua negara.

Sebagai upaya dalam problem solving, Dewan Negara Tiongkok menerbitkan keputusan tentang mereformasi sistem manajemen investasi yang menyatakan penghentian persetujuan sistem. Tujuan keputusan ini

untuk mengimplementasikan sistem otorisasi dan sistem rekaman, serta prosedur yang ketat dan rumit seperti memeriksa dan memverifikasi mulai ditinggalkan, bertujuan memberi lebih banyak kebebasan terhadap perusahaan dalam investasi pengambilan keputusan. Fungsi Pemerintahan menjadi lebih berkonsentrasi pada melayani, mengawasi, dan mengatur. Peneliti juga menemukan upaya lainnya yang termasuk dalam resolving problem ini. MOFCOM, Kementerian Luar Negeri (MFA), serta Komisi Pengawasan Aset dan Administrasi Negara (SASAC) bersama-sama menerbitkan Surat Edaran untuk mengatur investasi luar negeri dan kerja sama perusahaan-perusahaan Tiongkok. Hal tersebut dikarenakan terjadinya peningkatan konflik tenaga kerja dan bisnis, masalah proyek perlindungan kualitas lingkungan. Perusahaan yang melanggar hukum dan peraturan sehingga menyebabkan masalah serius di negara penerima akan dihukum oleh MOFCOM, MFA dan SASAC.⁴⁶

Kedua pihak akan memfasilitasi pengorganisasian dan memberikan layanan simposium, seminar dan kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi investasi untuk pihak lainnya juga investornya. Jika seorang investor dari salah satu pihak menderita kerugian sehubungan dengan investasi atau pengembaliannya di pihak lain karena konflik bersenjata dan keadaan darurat atau kejadian serupa itu berlangsung di pihak lain, pihak lainnya akan memberikan ganti rugi, kompensasi, atau resolusi lain yang tidak kalah menguntungkan dari yang diberikan untuk investor itu sendiri atau investor pihak ketiga mana pun dalam situasi yang serupa, mana pun yang paling menguntungkan bagi investor.⁴⁷

Hingga tahun 2014, perwakilan Tiongkok dan Taiwan hanya bertemu melalui organisasi tidak resmi atau melalui pensiunan pejabat, karena Beijing menghindari dan telah menentang segala langkah yang mungkin dianggap mengakui kedaulatan Taiwan. Pertemuan bersejarah di kota Nanjing ini merupakan pembicaraan yang difokuskan pada cara-cara untuk meningkatkan dan memformalkan komunikasi antara kedua belah pihak,

⁴⁶ Huang Wenbin. "Analysis of China's Overseas Investment Policies." Center For International Forestry Research: Bogor Barat. 2011. Diakses pada 27 Juni 2019 pukul 15:44. https://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP-79CIFOR.pdf

⁴⁷ Chairmant Straits Exchange Foundation. "Cross-Straits Bilateral Investment Protection and Promotion Agreement". Association for Relations Across the Taiwan Straits. diakses pada 28 Juni 2019 pukul 13:52. www.ecfa.org.tw/Download.aspx?No=24&strT=DMAAd

serta perdagangan dan partisipasi Taiwan dalam perjanjian ekonomi regional. Dalam pembicaraan juga mengangkat masalah kunjungan konsuler ke Taiwan yang ditahan di Tiongkok, asuransi kesehatan bagi siswa Taiwan yang belajar di Tiongkok dan perlakuan adil terhadap wartawan Taiwan yang bekerja di Tiongkok.⁴⁸

Peneliti juga menemukan upaya *problem solving* Pemerintah Tiongkok dalam realisasi ECFA. Pemerintah Tiongkok menyelenggarakan One Day Open Session pada tahun 2014. Pada kesempatan ini, pihak pebisnis dari kedua pihak diberi kesempatan untuk melakukan penyajian laporan tentang aktifitas bisnis, perencanaan bisnis, dan pemberdayaan pegawai. Diakhir kesempatan ini, akan disusun kesimpulan dengan penilaian kesepakatan dan akan dikirim ke badan resmi masing-masing investor yang hadir. Diharapkan dengan adanya kesempatan ini menghasilkan beberapa tanggapan yang bermanfaat bagi kedua pihak.⁴⁹

Kesimpulan

Diawali dengan masa lalu yang buruk antara Taiwan dan Tiongkok seperti, perang saudara hingga kompetisi atas pengakuan negara, keduanya dipaksa untuk saling berinteraksi dalam berbagai aspek sosial dan ekonomi seiring berjalannya waktu. Tahun 2010, terbangun suatu perjanjian yang disebut ECFA menjadi awal sejarah baru dalam menghidupkan lagi prinsip Kebijakan Satu Tiongkok (*One China Policy*) sebagai tonggak sejarah dalam upaya perdamaian di Selat Taiwan yang melibatkan antara Taiwan dan Tiongkok. Dari ECFA tersebut seakan menjadi pintu masuk Tiongkok untuk menjadikan Taiwan satu bagian dari Tiongkok dengan terciptanya beberapa perjanjian yang tercipta setelah ECFA dibentuk.

Dalam segi upaya reunifikasi, keinginan Tiongkok dalam *One China Policy*, ECFA digunakan untuk menjalin hubungan yang baik dalam segi politik maupun ekonomi. Pemerintah Tiongkok merealisasikan ECFA melalui kerangka diplomasi komersial Potter, yakni terdapat 5 upaya dari Pemerintah Tiongkok yang

⁴⁸ Alexander Yuan. "China and Taiwan Hold First Direct Talks Since '49". Associated Press. The New York Times. diakses pada 28 Juni 2019 pukul 14:06 <https://www.nytimes.com/2014/02/12/world/asia/china-and-taiwan-hold-first-official-talks-since-civil-war.html>

⁴⁹ Claudia Elisabeth. "Reports From ECFA, the European Committee for Future Accelerators." Institute of High Energy Physics of the Austrian Academy of Sciences Nikolsdorfergasse 18, A-1050 Vienna, Austria. 2015. Diakses pada 7 Juli 2019.

sesuai dengan *Value Chain of Diplomacy Commercial*. 1) *Intelligence* berupa informasi 5 bidang kebutuhan Taiwan yang dijadikan keutamaan dan Pemerintah Taiwan ingin membantu pelaku bisnisnya mengembangkan industri di luar Taiwan. 2) *Networking and public relations*, berupa upaya kerjasama ekonomi yang tercantum dalam ECFA bagian 3 pasal 6, dalam segi upaya tindak lanjut dalam hubungan pengembangan relasi bisnis tercatat 5 pertemuan antara Tiongkok dan Taiwan. 3) *Contract negotiator of implementation* berupa upaya negosiasi bisnis yang menghasilkan beberapa kebijakan insentif ekonomi yang dijalankan oleh Pemerintah Tiongkok, sekaligus memenuhi 5 bidang kebutuhan Taiwan. 4) *Problem solving* berupa upaya penyelesaian masalah dalam bisnis yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok, seperti MOFCOM, Kementerian Luar Negeri (MFA), serta Komisi Pengawasan Aset dan Administrasi Negara (SASAC) bersama-sama menerbitkan Surat Edaran untuk mengatur investasi luar negeri dan kerja sama perusahaan-perusahaan Tiongkok. Perusahaan yang melanggar hukum dan peraturan sehingga menyebabkan masalah serius di *host country* akan dihukum oleh instansi Pemerintahan tersebut. Upaya tersebut digunakan oleh Tiongkok dengan tujuan agar hubungan Tiongkok dan Taiwan berjalan harmonis, sehingga tujuan utama dari Kebijakan Satu Tiongkok dapat tercapai. Dari hasil upaya yang dilakukan oleh Tiongkok dalam ECFA sebagai realisasi Kebijakan Satu Tiongkok, yaitu dengan berusaha memenuhi kebutuhan Taiwan, setidaknya menciptakan ketergantungan Taiwan terhadap Tiongkok.

Referensi

- “Directorate General of Customs.” Ministry of Finance. Taiwan. diakses pada 2 Oktober 2018 pukul 12:18, <https://cus93.trade.gov.tw/FSCE010F/FSCE010F>.
- “Ministry of Economic Affairs Taiwan”. www.ecfa.org.tw/Download.aspx?No=34&strT=ECFADoc
- “Taiwan Affairs Office.” diakses pada 31 Maret 2019, pukul 23:08. http://www.gwytb.gov.cn/en/Special/OneChinaPrinciple/201103/t20110317_1790086.htm
- “Taiwan Profile.” British Broadcasting Corporation. diakses pada 5 April 2019 pukul

20:22 <https://www.bbc.com/news/world-asia-16178545>

“Taiwan.gov.tw.” diakses pada 1 Oktober 2018 pukul 13:03, https://www.taiwan.gov.tw/content_3.php.

“The One-China Principle and the Taiwan Issue,” diakses pada 23 Februari 2019 pukul 08:49, <http://www.china.org.cn/english/taiwan/7956.htm>

“Trading Economics.” Taiwan Exports. diakses pada 2 Oktober 2018 pukul 12:15, <http://www.tradingeconomics.com/taiwan/exports>

Alfanisa, Winda. “Pengaruh Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) terhadap Isu “One China” antara Cina dan Taiwan.”(Skripsi S.Hub.Int, Universitas Gadjah Mada, 2016).

Bureau of Foreign Trade. Ministry of Economic Affairs. diakses pada 5 April 2019 pukul 11:23 <https://cus93.trade.gov.tw/>

Banning, Gareth. “Taiwan In Search of a Strategic Consensus.” Atlantic Council. 2006. Diakses pada 30 Maret 2019 pukul 22:12. <https://www.atlanticcouncil.org/publications/issue-briefs/taiwan-in-search-of-a-strategic-consensus>

Chairmant Straits Exchange Foundation. “Cross-Straits Bilateral Investment Protection and Promotion Agreement”. Association for Relations Across the Taiwan Straits. diakses pada 5 April 2019 pukul 14:12. www.ecfa.org.tw/Download.aspx?No=24&strT=DMAd

Cheng Chen, Hsiang. “Minister of Justice Heads to China on Historic Visit. Taipei Times. 2016. diakses pada 31 Maret 2019 pukul 22:17. <http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2016/03/29/200364> 2679

Chi Kuan, Huang. “China unveils 31 measures to promote exchanges with Taiwan.” Focus Taiwan News Channel. 2013. diakses pada 31/03/2019 pukul 21:16, <http://focustaiwan.tw/news/aall/201306160027.aspx>

Tsai, T. “Cross-Straits Relations and Regional Integration: A Review of the Ma Ying-jeou Era (2008—2016),” Journal of Current Chinese Affairs (2017):13-14, diakses pada 24 Februari 2019 pukul 07:21, ISSN:1868-4874

Chou, Jay. “Taiwan, Chinese ministers meet in groundbreaking first.” Focus Taiwan News Channel. 2013, diakses pada 29 Maret 2019 pukul 12:23. <http://focustaiwan.tw/news/acs/201310060010.aspx>

Dongyang, Zhang. “不加引号的台湾部长”. New York Times. 2014. diakses pada 5 April 2019 pukul 23:16. <https://cn.nytimes.com/china/20140213/cc13taiwan/>

Elisabeth, Claudia. Reports From ECFA, the European Committee for Future Accelerators. Institute of High Energy Physics of the Austrian Academy of Sciences Nikolsdorfergasse 18, A-1050 Vienna. 2015.

- Friedman, Edward. "Taiwan's Dilemmas and International Peace." (Abingdon: Oxon Routledge, 2006). diakses pada 1 Oktober 2018 pukul 18:25, <http://trove.nla.gov.au/version/207866921>.
- Grace Lestariana, Winoardi, "Menelisik Kedaulatan Taiwan," Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2013), diakses pada 23 Februari 2019 pukul 06:28, <http://hi.umy.ac.id/menelisik-kedaulatan-taiwan/>
- Hong Zhao. "Taiwan Mainland Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA): Implication for Cross Straits Relations." EAI Background Brief No.452. 2009. Diakses pada 7 Juli 2019, pukul 01:19. <http://www.eai.nus.edu.sg/publications/files/BB452.pdf>
- Kostecki, Michel and Oliver Naray. "Commercial Diplomacy and International Business." (2007) *Discussion Papers in Diplomacy* April, https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20070400_cdsp_diplomacy_kostecki_naray.pdf
- M, Christopher. "Taiwan and the New East Asian Regionalism." *Issues & Studies* 45 (2009): 144-55, diakses tanggal 24 Februari 2019 pukul 09:13, <http://140.119.170.21/attachments/journal/add/107-158.pd>
- M, Porter. "Competitive Strategy, Techniques for Analysing Industries and Competitors." (Free Press, 1980). diakses pada 18 Maret 2019, pukul 1:17, [https://www.albany.edu/~gs149266/Porter%20\(1985\)%20-%20chapter%201.pdf](https://www.albany.edu/~gs149266/Porter%20(1985)%20-%20chapter%201.pdf)
- Macartney, Jane. "Taiwan opens up to mainland Chinese investors." *The Times*. London. 2009. diakses pada 29 Maret 2019 pukul 14:55. <https://web.archive.org/web/20090508083450/http://business.timesonline.co.uk/tol/business/economics/article6199775.ec>
- M. Fahrezal Maulana, Kholis Roisah & Peni Susetyorini. "Implikasi One China Policy Terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Taiwan dalam Perspektif Hukum Internasional". (2016) *Diponegoro Law Journal* Vol.5 No.3 <https://media.neliti.com/media/publications/19470-ID-implikasi-one-china-policy-terhadap-hubungan-luar-negeri-indonesia-dan-taiwan-da.pdf>
- Min Hua, Chiang. "The Controversial Cross Straits Service Trade Agreement". EAI Background Brief No. 919. 2014. Diakses pada 4 April 21:34. <http://www.eai.nus.edu.sg/publications/files/BB919.pdf>
- Moss, Larissa. "Business Intelligence Roadmap: The Complete Project Lifecycle for Decision-Support Applications." Addison Wesley Professional (2003). diakses pada 23 Maret 2019 pukul 14:21, https://trove.nla.gov.au/work/16488348?selectedversion=NBD2409024_7
- Potter, Evan. "Branding Canada: The Renaissance of Canada's Commercial

- Diplomacy.” (International Studies Perspective, 2004). diakses pada 23 Maret 2019, pukul 12:48, https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20120504_cling_research_artikel_discussionpaperindiplomacy_123_ruel_and_zuidema.pdf
- Qing. “台湾投资者：如何在大陆保护你的投资：简析(海峡两岸投资保护和促进协议)”. Zhong Lun Law Firm. diakses pada 5 April 2019 pukul 11:12. <http://www.zhonglun.com/UpFile/File/201308061453071610.pdf>
- Rahmadhani, Ayu. “Analisis Ketergantungan Ekonomi Taiwan – Cina terhadap Prospek Reunifikasi dalam *One China Policy*.” (Skripsi S.Hub.Int, Universitas Airlangga, 2014).
- Reus Diaz. “Beijing and Taiwan Work Close to Bring More Opportunities to China”. Diakses pada 25 Mei 2019 pukul 20:12. <http://diazreus.com/beijing-and-taiwan-work-closer-to-bring-more-opportunities-to-china/>
- S, Arikunto. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002.
- Shin Horng, Chen, Meng-Chun Liu, and Pei Chang Wen. “The ECFA and Its Effect on Cross-strait Trade and Investment: A Taiwanese Perspective.” *China Economic Journal* 4 (2011): 105-24, diakses pada 24 Februari 2019 pukul 09:48, doi:10.1080/17538963.2011.666060
- Shu Hua, Lee. “President Ma to meet China's Xi in Singapore Saturday.” Focus Taiwan News Channel. 2015. diakses pada 31 Maret 2019 pukul 22:09. <http://focustaiwan.tw/news/afav/201511040001.aspx>
- Staff Writer. “China Picks Up Hotline Call.” Taipei Times. 2016. diakses pada 31 Maret 2019 pukul 22:12. <http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2016/02/06/2003638953>
- Sugiyono. Memahami penelitian Kualitatif. Bandung. ALFABETA. 2010
- Sujarwo, Briansyah. “Kepentingan Politik Luar Negeri China di Wilayah Taiwan Melalui Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) tahun 2010.” (Skripsi S.Hub.Int, Universitas Brawijaya, 2013).
- Wenbin, Huang. “Analysis of China’s Overseas Investment Policies.” Center For International Forestry Research: Bogor Barat. 2011. Diakses pada 27 Juni 2019 pukul 15:44. https://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP-79CIFOR.pdf
- Xinhuanet.com, “Mainland, Taiwan organizations hold first talks in 9 years, diakses pada 6 Maret 2019 pukul 23:15, <http://www.xinhuanet.com/mainland-taiwan-organizations-hold/>
- Yu Hsin, Kuo. “Towards One Taiwan One China: Discard Outdated One China Policy.” *International Committee for Human Rights in Taiwan* (1996): 14- 15, diakses pada 3 Oktober 2018 pukul 14:23, doi:1027-39999. <https://www.taiwandc.org>

Yu, Lee Cheng. "Liangnan guanxi de fazhan yu kunjing," The Development of Cross-Strait Relations and Its Dilemma (2010), diakses pada 24 Februari 2019 pukul 08:23, <https://core.ac.uk/download/pdf/143832144.pdf>

Yuan, Alexander. "China and Taiwan Hold First Direct Talks Since '49". Associated Press. The New York Times. diakses pada 28 Juni 2019 pukul 14:06 <https://www.nytimes.com/2014/02/12/world/asia/china-and-taiwan-hold-first-official-talks-since-civil-war.html>